

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dikemukakan penulis di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Netralitas Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Gorontalo masih belum efektif atau masih sering terjadi pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah, hal ini disebabkan masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu di Kabupaten Gorontalo terhadap keterlibatan ASN.
2. Bentuk pengawasan yang dilakukan Oleh Panitia Pengawas Pemilu masih belum efektif, apalagi terhadap ASN. Upaya preventif yang dilakukan masih belum tepat sasaran terutama kepada Aparatur Sipil Negara karena dilakukan pada jam kerja. Sementara itu untuk tindakan yang bersifat represif dalam hal ini pemberian sanksi masih kurang tegas, sehingga Pegawai Aparatur Sipil tidak memiliki rasa takut atau khawatir untuk terlibat langsung dalam kampanye Pilkada.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan agar kiranya:

1. Untuk mengurangi atau meminimalisir keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam proses kampanye pada pilkada di kabupaten gorontalo, panitia pengawas pemilu perlu melakukan pengawasan yang lebih tegas serta tepat sasaran dengan

melakukan koordinasi dengan kepala instansi pemerintahan yang ada di Kabupaten Gorontalo.

2. Bentuk pengawasan yang ideal untuk mengurangi atau meminimalisir keterlibatan aparatur sipil negara dalam proses kampanye pada pilkada yang disarankan oleh penulis adalah dengan memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk memberikan sanksi kepada aparatur sipil negara yang terbukti terlibat dalam proses kampanye pada pemilihan kepala daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Bambang Sunggono. 2012. *Metodologi Penelitian*. Rajawali Pers. Jakarta
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil. 2000. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineke Cipta. Jakarta
- Fenty U. Puluhulawa. 2013. *Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Perspektif Hukum*, Interpena Yogyakarta
- Jum Anggriani, 2014. *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sinar Grafika:jakarta
- Makmur, 2011, *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. PT. Rafika Aditama. Bandung
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, pustaka pelajar. Yogyakarta.
- , 2013, *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*. Setara Press, Malang.
- Ni'matul Huda. 2009. *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusa Media. Bandung.
- Miftah Thoha, 2010. *Manajemen Kepegawaian Sipil Di Indonesia*. Kencana, Jakarta
- Poerwadarminta, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Prajudi Atmosudirjo, 1994. *Hukum Administrasi Negara(Edisi Revisi)*, Balai Askara. Jakarta

Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

\_\_\_\_\_, 2006. *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*: Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

R Muhammad Mihardi, Republik Tanpa Publik Pasca Reformasi (Retaknya Relasi Negara, Hukum dan Demokrasi). Pusat Studi Hukum dan Demokrasi Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Bogor. 2012 Halm 13

Samsul Wahidin, 2008, *Hukum Pemerintah Daerah (Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah)*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Siwanto Sunarno. 2005. *Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Sinar Grafika:Jakarta.

Sri Hartini, 2010 Setiajeng Kadarsih dan Tedi Sudrajat. *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta

Zainuddin Ali, M.A. 2010. *metode penelitian hukum*, Sinar Grafika. Jakarta

#### **B. Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 *jo* Undang-Undang No 8 Tahun 2015  
Tentang Pemilihan Kepala Daerah

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2010 tentang Larangan dan Disiplin ASN

Peraturan Pemerintah 78 tahun 2012 tentang perubahan ketiga atas Peraturan  
Pemerintah Nomor 6 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan  
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

### **C. Website**

Srikandi Rahayu, <http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2014/04/pengertian-makna-sistem-tahapan-tujuan-dan-manfaat-pemilu.html?m=> di akses pada Tanggal 5 Januari 2016

Andika Mongilala, <https://webandikamongilala.wordpress.com/2010/09/01teori-mengenai-pilkada-di-indonesia/> di akses pada Tanggal 21-02-2016 jam 19.00

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
FAKULTAS HUKUM



Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, 96128  
Telepon(0435) 8211125-825424 Faxmile (0435)821752  
Laman:http://www.ung.ac.id

Nomor : **502** /UN47.B9.1/KM/2016  
Hal : **Rekomendasi Izin Meneliti**

**22 Maret 2016**

**Yth. Ketua PANWASLU  
Kab. Gorontalo  
di Gorontalo**

Disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, maka dengan ini kami mohon Perkenan Bapak/Ibu memberikan izin pengambilan Data untuk dipergunakan penyusunan Skripsi yang berjudul "**Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Gorontalo 2015.**" Sebagaimana yang tercantum namanya dibawah ini:

Nama : Romansa R. Lapuna  
NIM : 271 412 204  
Angkatan : 2012/2013  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum

Demikian permohonan ini dibuat, atas kerja sama yang baik di ucapkan terima kasih.



**Zamroni Abdussamad, SH, MH**  
Wakil Dekan Bidang Akademik,

NIP. 19700712 200312 1 002

## LAMPIRAN 2

### LAPORAN DAN TEMUAN PELANGGARAN PILKADA KABUPATEN

#### GORONTALO TAHUN 2010

No	Penanganan laporan dan temuan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2010
1	Pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon dalam proses pelaksanaan kampanye, ada yang tidak menggunakan surat tanda terima pemberitahuan kampanye (STTPK) yang diterbitkan dari kepolisian
2	Pasangan calon lari dari ijin yang dikeluarkan oleh ijin kepolisian : Kampanye deologis atau tatap muka tapi kenyataan kampanye di lapangan dilakukan secara umum/terbuka sehingga tidak sesuai dengan ijin yang dikeluarkan oleh kepolisian
3	Pemahaman pasangan calon terhadap money politik terkesan abu-abu sehingga pada saat kampanye terjadi serah terima dalam bentuk uang
4	Keterlibatan kepala kecamatan telaga jaya dalam menerangkan pasangan calon, seringkali melibatkan diri bukan dilibatkan dalam masa kampanye pasangan calon
5	Pelanggaran tim sukses kampanye yang tidak terdaftar di KPU

Sumber: Kantor Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten  
Gorontalo

### LAMPIRAN 3

## LAPORAN DAN TEMUAN PELANGGARAN PILKADA KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2015

Sumber: Kantor Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kabbupaten Gorontalo

NO	NOMOR LAPORAN/TEMUAN	TANGGAL LAPORAN/TEMUAN	TEMPAT KEJADIAN	PELAPOR/PENEMU	TERLAPOR	POKOK LAPORAN DAN TEMUAN	STATUS LAPORAN/TEMUAN	KET
1	001/TM/KWK/X/2015	29-juni-2015	Kantor KPU	Temuan Panwas Kab Gorontalo	1. KPU Kabupaten Gorontalo 2. POKJA verifikasi dukungan calon perseorangan 3.	Proses pelaksanaan verifikasi dukungan calon perseorangan	Sebagai pelanggaran administrasi dan telah direkomendasikan ke KPU Kab Gorontalo	Temuan Panwas Kabupaten Gorontalo
2	002/TM/KWK/X/2015	06/10/2015	Desa Buhu Kec Telaga Kab Gorontalo	Temuan Panwas Kab Gorontalo	Pasangan calon Bupati dan Wakil Nomor Urut 2 Nelson-Fadli	kampanye yang melibatkan kepala desa Buhu kec Telaga Kab Gorontalo	1. Merekomendasikan kepada Bupati untuk menjatuhkan sanksi kepada kepala desa Buhu kec. Telaga Jaya	

3	003/TM/KWK/X/2015	06/10/2015	Kel Hinggaluwa Kec Limboto Kab Gorontalo	Temuan Panwas kabupaten Gorontalo	Tim Kampanye Pasangan Calon No 4 Toni-Sofyan	Dugaan Money Politik yang dilakukan Tim Kampanye Pasangan calon No 4 Tony-S	Di hentikan tidak terdapat cukup bukti	
4	001/LP/BTD- P/KWK/XII/2015	06/08/2015	Desa Bongo Kec Batudaa Pantai	Ibrahim Pateda	Sutrisno Kadir	Dugaan Money Politik yang dilakukan oleh strisno Kadir untuk memilih Paslon nomor urut 2 NAFAS	Dihentikan tidak memenuhi syarat formil/Saksi yang di ajukan tidak bersedia menandatangani B.A klarifikasi	Laporan Panwas Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo
5	02/LPP/KWK/XII/2015 Panwas kecamatan Tibawa	12/10/2015	Dusun Jati Desa Labanu Kec Tibawa Kab Gorontalo	Nurhayati Djafar	Reynold Pasune	Dugaan Pembagian Kartu Pemantau Paslon nomor urut 2 NAFAS	Dihentikan tidak memenuhi syarat formil dan syarat material /tidak ada saksi yang diajukan	Laporan Panwas Kecamatan Tibawa Kab Gorontalo
6	03/LPP/KWK/XII/2015	12/10/2015	Dusun Jati Desa Labanu Kec Tibawa Kab Gorontalo	Ruslin Moo	Nurlin Ibrahim	Dugaan Money Politik untuk memilih Paslon nomor urut 4 Toni-Sofyan TS	Dihentikan tidak memenuhi syarat formil dan syarat material /tidak ada saksi yang diajukan	

7	02/LPP/KWK/PNW-TLG/XII/2015	14/12/2015	Desa Dulohupa Kec Telaga Kab Gorontalo	Aten Herman Daud	Ustadz Adam Halukoi	Dugaan Money Politik untuk memilih Paslon nomor urut 4 Toni-Sofyan TS	Tahap Klarifikasi	Laporan Panwas Kecamatan Telaga Kab Gorontalo
8	001/LPP/KWK/XI/2015 5	13/11/2015	Desa Dunggala Kec Tibawa kab Gorontalo	Temuan Panwas Kecamatan Tibawa diteruskan Kepada Panwas Kabupaten Gorontalo	1 Ir. Fadel Mohamad 2 Hana Hasana	Dugaan Money Politik Yang dilakukan oleh tim dari pasangan calon nomor urut 4 Toni- Sofyan	1. Di hentikan bukan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan yang mengatur tentang pilkada 2. Merekomendasikan kepada Badan Kehormatan DPD-RI untuk menjatuhkan sanksi kepada Hana Hasanah sesuai ketentuan yang berlaku	Laporan Panwas Kabupaten Gorontalo Tahapan Kampanye
9	002/LP/KWK/XII/2015	12/06/2015	Desa Dulohupa Kec Boliyohuto Kab Gorontalo	Ramadhan Kasim, SH.MH	Heriyanto Karim	Tindakan kepala Desa yang merugikan pasangan calon Bupati dan Wakil No Urut 1 Rustam-Anas	1. Merekomendasikan kepada Penjabat Bupati Gorontalo untuk menjatuhkan sanksi Adminstrasi kepada kepala Desa Dulohupa Kec Boliyohuto Kab Gorontalo	Laporan Panwas Kabupaten Gorontalo

10	003/LP/KWK/XII/2015	12/08/2015	Desa Momala Kec Dungaliyo Kab Gorontalo	Oni Nusi	1.Irna Kasim 2.Sam T Ase	Dugaan Money Politik yang dilakukan oleh Irna Kasim dan Sam T ase Tim Kampanye Pasangan calon No 2 NAFAS	Ditundaklanjuti dan diteruskan 1 Kepolisian Resort Gorontalo 2 KPU Kab.Gorontalo	Tahapan Hari Tenang
11	004/LPP/KWK/XII/201 5	12/08/2015	Desa Barakati Kec Batudaa kab Gorontalo	Bastian A. Moha	Sofyan Badaru	Dugaan Money Politik Yang dilakukan Sofyan Badaru untuk memilih Paslon nomor urut 4 Toni-Sofyan TS	Ditundaklanjuti dan diteruskan Kepolisian Resort Gorontalo	
12	005/LPP/KWK/XII/201 5	12/09/2015	Desa Dunggala Kec Tabongo Kab Gorontalo	Harton Halid	Elmus Lesar	Dugaan Money Politik Yang dilakukan oleh tim dari pasangan calon nomor urut 4 Toni- Sofyan TS	Dihentikan karena tidak terpenuhi unsur pelanggaran uu no 1 2015 dan tidak terdapat bukti permulaan yang cukup	

13	006/LPP/KWK/XII/201 5	10/10/1900	Desa Potanga Kec Boliyohuto kab Gorontalo	Ibrahim A Rasid	Heri Tedi	Money Politik Uang Yang dilakukan Heri Tedi Kepala desa diloniyohu kec Boliyohuto untuk memilih nomor urut 4 Toni-Sofyan TS	Dihentikan tidak ditemukan unsur pelanggaran dalam ketentuan UU No 1 2015 sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan uu no 8 tahun 2015
14	007/LPP/KWK/XII/201 5	10/10/2015	Desa Pilomonu Kec Boliyohuto kab Gorontalo	Nara adarani	Mustafa Mahruju	Money Politik Uang Yang dilakukan Mustapa Mahruju untuk memilih nomor urut 2 NAFAS	Dihentikan tidak memenuhi syarat formil dan syarat material,seluruh unsur pasal 73 uu no 1 thn 2015 tidak terpenuhi dan tidak terdapat bukti permulaan yang cukup
15	008/LPP/KWK/XII/201 5	11/12/205	Desa Motinelo Kec Tabongo Kab Gorontalo	Santo Lahati	Fista	Tindakan Fista yang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih pasangan calon nomor 2 NAFAS	Dihentikan tidak memenuhi syarat formil dan syarat material

16	009/LPP/KWK/XII/2015 5	12/11/2015	Desa Bina Jaya Kec Tolangohula Kab Gorontalo	Haris Ngguyu	Iton Pasila	Dugaan mempengaruhi dan menjanjikan pemilih Dengan uang yang dilakukan oleh Iton Pasila untuk Memilih Pasangan nomor 2 NAFAS	Dihentikan fakta yang terungkap dari pelapor, saksi dan terlapor sebahagian unsur pasal 73 uu no 1 thn 2015/ tidak terdapat dugaan pelanggaran terhadap ketentuan UU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
17	010/LPP/KWK/XII/2015 5	12/11/2015	Desa Luhu Kec Telaga Kab Gorontalo	Hamsa Ali	Popi Lakoro	Tindakan Saudara Popy Lakoro yang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih pasangan calon nomor 2 NAFAS	Dihentikan tidak memenuhi syarat formil dan syarat material

18	011/LPP/KWK/XII/201 5	11/11/2015	Desa Motinelo Kec Tabongo Kab Gorontalo	Almin Yunus	Ceni Mohamad	Tindakan Sandra Ceni Mohamad yang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih pasangan calon nomor 2 NAFAS	Dihentikan tidak memenuhi syarat formil dan syarat material
19	012/LPP/KWK/XII/201 5	11/12/2015	Kel Polohungo Kec Limboto Kabupaten Gorontalo	Ratna Amlannya	Jemi Harun	Dugaan Money Politik Yang dilakukan oleh Jemi Harun untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 NAFAS	Dihentikan karena unsur pasal uu no 1 2015 tidak terpenuhi dan tidak terdapat bukti permulaan yang cukup
20	013/LPP/KWK/XII/201 5	12/12/2015	Dusun Talapangi Desa Tabongo Barat Kec Tabongo Kab Gorontalo	Risamto Mohamad	Zainudin Liputo selaku kepala dusun talapangi Desa Tabango Barat	Tindakan aparat desa tabongo barat kec tabongo yang membagi-bagikan kartu untuk	dihentikan tidak memenuhi syarat formil dan syarat material

						pemenangan paslon bupati dan wakil bupati gorontalo no urut 1 RA	
21	014/LPP/KWK/XII/2015 5	16/12/2015	Desa Payungan Kec Batudaa Kab Gorontalo	Imran A Nuna	Rustam Akili Anwar Borong	dugaan money politik yang dilakukan oleh pasangan calon Bupati dan wakil bupati No urut 1 RA	Tahap Klarifikasi
22	015/LPP/KWK/XII/2015 5	16/12/2015	Desa Payungan Kec Batudaa Kab Gorontalo	Joni Ayuba	Anis	Tindakan saudara Anis yang memberikan kartu rukun sejahtera dan menjanjikan beras jika memilih pasangan nomor urut 1 RA	Tahap Klarifikasi

## CURRICULUM VITAE

### A. IDENTITAS DIRI



Nama : Romansa R.  
Lapuna  
Nim : 271 412 204  
TTL : Paleleh, 31 Mei 1990  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Status : Mahasiswa  
Angkatan : 2012/2013  
Prodi : S1 Ilmu Hukum  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Bidang Keahlian : Hukum Tata Negara  
Alamat : Desa Molangato,  
Kecamatan Paleleh,  
Kabupaten Buol

### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

#### 1. PENDIDIKAN

- a. SD : SDN 2 PALELEH (2002)
- b. SLTP : SMP NEGERI 1 PALELEH (2005)
- c. SMA : SMA NEGERI 1 PALELEH (2008)
- d. P. T : UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO (2012)

#### 2. PENDIDIKAN NON FORMAL

- Peserta MOMB (Masa Orientasi Mahasiswa Baru) Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2012
- Mengikuti Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014.
- Mengikuti Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014.
- Mengikuti Kuliah Kerja Sibermas (KKS) di Desa Mokonowu, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara pada Tahun 2015.